

BAB III

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM M. UMER CHAPRA DAN KONDISI PEREKONOMIAN DI INDONESIA

3.1 Biografi Pendidikan dan Karya Umer Chapra

3.1.1 Pendidikan M. Umer Chapra

M. Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Pakistan yang kemudian menetap dan mendapatkan kebangsaan Saudi. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933 di anak Benua India yang pada waktu itu belum terbagi menjadi Pakistan dan India. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Umer Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya di habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun kemudia ia pindah ke Karachi untuk meneruskan pendidikannya disana sampai meraih gelar Ph.D dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke 29 ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunnisa Jamal Mundis tahun 1962 dan mempunyai empat anak Maryam, Anas, Sumayyah dan Ayman.⁵²

⁵² Ekonomi Syariah, "Dr M. Umer Chapra" Artikel diakses pada 15 desember 2013, <http://blogekonomisyariah.wordpress.com/2010/03/30/dr-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam>

Dalam karir akademiknya M. Umer Chapra dari kecil sudah memperlihatkan kecerdasan sehingga pada ujian mendapatkan medali emas dari Universitas Sind pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihinya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa.⁵³ Setelah itu beliau melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di Universitas of Karachi dan memperoleh gelar B.Com pada tahun 1954 dan M.Com pada tahun 1956. Beliau akhirnya menyelesaikan program Ph.D dalam bidang ekonomi di Universitas of Minnesota pada tahun 1961.⁵⁴

Semasa menjadi mahasiswa beliau telah berusaha untuk mempelajari ajaran Islam yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi. Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari AS pada tahun 1961 M. Umer Chapra bergabung dalam *Center Institute of Islamic Research* dan berkuat selama 2 tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi system ekonomi yang sehat. Upaya ini yang kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam setelah menghantarkan kepada

Luqman, "Dr. M. Umer Chapra, ekonomi muslim kontemporer" artikel diatas diakses pada 14 desember 2013 dari <http://blogekonomisyariah.wordpress.com/2010/03/30/dr-umer-chapra-tokoh-ekonomi-islam-kontemporer.html>

M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, hlm.ix

bukunya yang berjudul *The Economic System Of Islam A Discussion of Its Goals and Nature* (London, 1970).⁵⁵

Pada tahun 1964 M. Umer Chapra berangkat kembali ke AS. Setelah mengajar ekonomi di beberapa Universitas di AS selama beberapa tahun, beliau bergabung dengan Saudi Arabian Monetary Agency sebagai penasehat ekonominya. Asosiasinya yang lama dengan organisasinya ini telah memberikan beliau segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan financial masa kini. Kendati beliau berhubungan tugas-tugas professional yang berkaitan dengan kebijakan moneter, beliau tetap sebagai sarjana. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan berpikir mengenai karakteristik suatu system moneter dan kenyataannya suatu system ekonomi yang suatu saat dapat menjadi Islami dan layak berjalan. Beliau percaya bahwa sebuah system moneter yang adil dapat ditegakkan hanya pada prinsip-prinsip Islam. Doktrin yang mendominasi dunia kapitalisme, sosialisme, komunisme dan doktrin negara kesejahteraan, semuanya terlalu lemah untuk membimbing manusia dalam upayanya menegakkan sistem ekonomi yang mengombinasikan kemajuan ekonomi dan keadilan serta menjamin standar hidup yang lebih tinggi yang melaju sama cepatnya dengan standar moral yang tinggi. Ini adalah focus utama M. Umer Chapra dalam

⁵⁵ Ibid, hlm.ix

bukunya yang berjudul *Toward a Just Monetary System* (Leicester, 1985).

56

Beliau mempunyai pengalaman luas dalam mengajar dan riset di bidang ilmu ekonomi. Nama beliau selalu melekat dengan sejumlah lembaga-lembaga riset akademik bergengsi seperti *Institute of Development Economics* dan *Central Institute of Islamic Research* Pakistan. Beliau telah mengajar pada Universitas Wisconsin Plattville dan Kentucky, Lexington USA. Selama dua puluh tahun terakhir beliau telah mengabdikan sebagai ekonomi senior Saudi Arabia Moneter Agency. Beliau menguasai betul perspektif pengetahuan barat maupun islam dalam ilmu ekonomi dan kemasyarakatan. Dalam lima belas tahun terakhir beliau secara mendalam terlibat dalam pengembangan pendekatan islam pada ilmu ekonomi. Karyanya yang pertama *Toward a Just Monetary System* memperoleh pujian dari kalangan masyarakat dunia islam dan telah membawanya memperoleh medali bergengsi yaitu *Islamic Development Bank Award* karena pengabdiannya pada ekonomi islam (1990) dan *King Faisal International Price* untuk kajian islam (1990). Dengan demikian M. Umer Chapra adalah pakar yang kompeten yang dapat berbicara secara

⁵⁶ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hxvi-xvii)

lebih fundamental mengenal persoalan-persoalan system perekonomian saat ini.⁵⁷

Kritis dan konstruksi itulah corak pemikiannya yang telah banyak mempengaruhi ekonomi muslim di dunia. Mazhab pemikirannya beraliran mainsteam mempertahankan pendapat orang banyak. Dimana tokoh-tokoh aliran ini berpendapat bahwa masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan konvensional yaitu sumber daya itu terbatas. Setidaknya menjadi aspek pemikiran beliau yang tergambar pada karya-karyanya. Motif utama pemikirannya adalah spritualisasi pemikiran dan kesejahteraan sosial dengan menjadikan kehidupan yang selaras antara kebahagiaan di dunia dan akhirat. Motif ini tergambar dalam bukunya *Islam and the Ekonomic Challenge*. Dalam bukunya *The Future of Ekonomic an Islamic Perspektive* beliau banyak merujuk kitab-kitab klasik terutama konsep Ibnu Koldum. Beliau menformulasikan bukunya ini sangat dikagumi oleh Prof. Samuel Hayes III dari Harvad dan sarjana-sarjana terkemuka Jerman, Spanyol, Inggris, DR. Murad Hofman dari Jerman memberikan berkomentar kalau buku ini adalah buku yang sangat penting pada abad ini untuk kebangkitan Islam⁵⁸. Demikianlah sekilat tentang pemikir ekonomi Islam M. Umer Chapra.

⁵⁷ *Ibid*, h.xvi

⁵⁸ Eko Susanto, :biografi DR. M. Umer Chapra”, artikel diakses pada 14 desember 2013 dari <http://indonesiakiblat.ekonomiislam.dunia.blogspot.com/2009/06/biografi-drm.umer-chapra.html>

3.1.2 Karya-Karyanya M. Umer Chapra

Beliau terkenal dengan kontribusinya mengenai perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Beliau sangat dihormati atas pandangan dan pendekatan ilmiahnya.⁵⁹ M. Umer Chapra telah menulis tak kurang 16 buah buku dan monograf serta lebih dari 100 paper dan review buku-buku. Beberapa diantara buku monograf dan paper itu telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa antara lain Arab, Bangladesh, Perancis, Indonesia, Jepang, Malaysia, Persia, Polandia, Spanyol, Turki dan Urdu.

Berkat kontribusinya yang beragam bagi ekonomi Islam tahun 1989 M. Umer Chapra memperoleh penghargaan *King Faizhal Internasional in Award Islamic Studies* serta penghargaan dari *Islamic Development Bank Award in Islamic Economics* sebagai tokoh penulis terbaik yang memberikan sumbangan alternative solusi praktek ekonomi skala internasional.

Beberapa karya tulisan Umer Chapra adalah :

1. Menuju Sistem Moneter (Leicester, UK: yayasan Islam, 1985).
 2. Sistem Ekonomi Islam (diterbitkan secara bersamaan oleh Pusat Islam, London dan Universitt of Karachi-1970)
 3. Tujuan Ekonomi Islam Orde (Leicester, UK. Yayasan Islam, 1979)
- tulisan ini merupakan dua bab pertama buku itu, Sistem ekonomi Islam (London : Islam Dewan Eropa, 1975)

⁵⁹ Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi (Jakarta, Granada Press, 2007), h. 263

4. Menagara Kesejahteraan Islam dan Peranan dalam Ekonomi (Leicester, UK. Yayasan Islam, 1979). Makalah ini pertama kali dipresentasikan pada Konferensi Ekonomi Islam di Mekah pada bulan Februari 1976 di bawah maungan Raja Abdul Aziz Universitas dan diumumkan dalam Khurshid Ahmad Zafar Ishaq Anshari, Islamic Perspektif (Leicester, UK, Yayasan Islam, 1979)
5. Islam dan Tantangan Ekonomi (Leicester, Uk. Yayasan Islam dan Washington DC, III, 1992)
6. Islam dan Pembangunan Ekonomi, Strategi Pembangunan dengan Stabilitas dalam terang Kehakiman dan Pengajaran Islam (Washington, DC dan Islamabad, III 1994)
7. Apa itu Ekonomi Islam, (Jeddah IRTI, IDB No. 9 di Hadiah Kuliah “ Pemegang seri IDB itu, 1996)
8. Masa Depan Ekonomi Sebuah Perspektif Islam (Leicester, UK. Yayasan Islam, 2000)
9. Dengan Khan Tarigullah, PERaturan dan Pengawasan Bank Islam (Jeddah, IRTI. IDB. Occasional Paper No. 3, 2000)
10. Larangan Bunga Apakah Mata Sence (Jakarta, Gerakan Dakwah Islam, Agustus 2001)
11. Dengan Habib Ahmad, Corporate Government di Lembaga Keuangan Islam (Jeddah IRTI, IDB, Occasional Paper No. 6, 2002)

12. Ekonomi dan Keuangan Reformasi, Dasar dari Arsitektur Bari (Dunia, Islam , Gerakan Dakwah, Agustus, 2004)
13. Buku Muslim peradaban, Penyebab Kemunduran dan Kebutuhan untuk Reformasi (Leicester, Uk, Yayasan Islam, 2008)
14. Visi Islam Pembangunan di Terang Maqajid al-Syariah (Jeddah, IRTI/ IDB, 2008 dan Washington Institut Internasional pemikiran Islam, 2008)
15. Krisis Keuangan Global, Beberapa Saran untuk Reformasi Arsitektur Keuangan Global di Cahaya Keuangan Islam (Kyoto, Jepang, Pusat Penelitian Studi Wilayah Islam, Kyoko Unoversity, 2008).⁶⁰

3.1.3 Strategi Pembangunan Ekonomi dalam Islam Perpektif

Chapra

Membebani suatu kewajiban moral bagi setiap warga masyarakat muslim untuk berusaha semaksimal mungkin mengembangkan persaudaraan dan keadilan sosioekonomi sedemikian rupa sehingga realisanya dan bukannya keabsenannya, menjadi karakteristik yang menonjol pada masyarakat itu. Dalam lapangan ekonomi, hal ini merupakan pembangunan yang berkeadilan dan mewujudkan stabilitas untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan

⁶⁰ M. Umer Chapra, :Buku dan Karya Tulis, “ Artikel diakses pada 15 desember 2013 dari [http](http://www.mchapra.com.html)”www.mchapra.com.html

distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang berkepanjangan.

Oleh karena adanya keterbatasan sumber daya dan ketidakseimbangan yang tengah berlangsung, maka pencapaian pembangunan yang demikian tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa pengurangan yang cukup besar klaim-klaim terhadap sumber daya disertai dengan realokasi penggunaannya yang kurang efisien dan merata. Realokasi seperti itu tidak dapat diwujudkan dalam kerangka kerja sistem sekuler yang bebas nilai dan berpandangan duniawi secepat sekalipun diikuti dengan intervensi pemerintah secara berlebihan dalam ekonomi. Strategi islam, bagaimanapun memiliki potensi besar untuk berhasil karena empat elemen yang saling berhubungan dan sangat efektif.⁶¹

A. Elemen-Elemen Strategi Yang Penting

1. Penyaringan yang merata atas klaim yang berlebihan

Problem pertama yang dihadapi setiap masyarakat dalam mengatualisasikan sasaran-sasaran egalitariannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tidak terbatas terhadap sumber-sumber daya dalam suatu cara tertentu dimana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Telah disampaikan di depan bahwa mekanisme harga memang bisa bertindak sebagai filter,

⁶¹ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press, 2000, hlm 163

namun hal itu tidak beroperasi dalam pola yang merata, karena itu Islam melengkapinya dengan menambah satu filter lagi yang akan menjamin pemerataan.⁶²

Saringan moral ini akan menyerang langsung jantung permasalahan kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas yaitu kesadaran individu yang paling dalam dengan mengubah skala preferensi mereka supaya mengikuti prioritas-prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber-sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia. Hal itu menghilangkan atau paling tidak meminimalkan, klaim-klaim yang tidak esensial dan tidak adil dilihat dari sudut pencapaian sasaran-sasaran sosial. Sebagai contoh misalnya filter itu tidak memperbolehkan penggunaan sumber-sumber daya untuk aktivitas-aktivitas yang secara moral dilarang, aktivitas yang hanya akan membunuh atau membahayakan manusia, binatang atau tanaman, baik sekarang maupun yang akan datang sehingga akan mereduksi kesejahteraan mereka. Filter itu membuat suatu gaya hidup yang bersahaja dan tidak mengizinkan gaya ekstravagansa atau penggunaan sumber-sumber daya untuk pamer diri atau untuk mengkonsumsi yang tidak ada manfaatnya, konsumsi-konsumsi yang sebenarnya tidak membedakan secara riil kesejahteraan manusia. Filter itu juga tidak mengizinkan perusahaan atau penggunaan yang berlebihan terhadap sumber-sumber daya seperti membakar makanan

⁶² *Idom*, 172

untuk menaikkan harga dan lain-lain. Filter itu juga mereorganisasikan lembaga-lembaga keuangan sehingga mampu mempersiapkan diri secara komplementer terhadap filter harga dalam membantu menekan klaim terhadap sumber-sumber daya sehingga berada dalam batas-batas kemanusiaan.

Dengan demikian filter moral memoderatkan dan memanusiakan pengaruh yang diciptakan oleh kekayaan, kekuasaan dan berbagai lembaga finansial dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya. Penyertaan filter moral memberikan implikasi evaluatif dan klaim-klaim atas sumber-sumber daya berdasarkan nilai moral yang secara sosial telah disepakati meskipun sebelum klaim-klaim tersebut diekspresikan didalam pasar. Setelah semua klaim atas sumber-sumber daya lolos melalui saringan moral, maka klaim-klaim yang tidak penting dan tidak adil dapat dieliminasi atau diminimalkan, dan setelah itu filter harga dari sistem pasar akan beroperasi selanjutnya.⁶³ Dengan demikian filter harga akan dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mewujudkan alokasi sumber-sumber daya yang efisien dan adil.

2. Motivasi

Masalah kedua yang dihadapi oleh setiap masyarakat adalah bagaimana memotivasi individu untuk melayani kepentingan sosial seiring dengan filter moral meskipun ketika berbuat demikian merugikan

⁶³ *Idom*, hlm 80

kepentingannya sendiri. Ini disebabkan oleh semua individu selalu ingin melayani kepentingannya sendiri dan bila mereka tidak berbuat demikian, perilaku mereka tidak kondusif bagi realisasi efisiensi yang optimal dalam penggunaan sumber-sumber daya.

Setiap upaya dalam mencegah individu melayani kepentingan sendiri, seperti yang telah dicoba oleh sosialisme, akan menemui kegagalan. Apa yang dilakukan oleh Adam Smith dalam rangka mengatasi konflik antara dua kepentingan adalah mencoba menunjukkan bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial.

Oleh karena hal itu tidak selalu benar, seperti yang sudah dikemukakan maka dalam rangka mewujudkan harmonisasi kepentingan individu dan sosial, individu harus dipersiapkan sedemikian rupa sehingga mengakui kebalikan apa yang telah dikatan oleh Adam Smith yaitu bahwa melayani kepentingan sosial pada hakikatnya melayani kepentingan diri sendiri ini adalah pendekatan Islam. Islam tidak melarang individu memenuhi kepentingannya sendiri, tetapi dengan memberikan kepentingan diri sendiri (self-interest) dimensi spritual dan berjangka panjang yang menembus wilayah kehidupan ini.⁶⁴ Apabila hal ini diteirma, yaitu bahwa maslahat individu dapat dipenuhi dengan nafsu keakuannya sekalipun, maka maslahatnya diakhirat tidak akan dapat

⁶⁴ *Idom* hlm 173

dipenuhi kecuali dengan berperilaku yang tidak merugikan kepentingan orang lain karena sama-sama berkedudukan sebagai khalifah Allah sama-sama memiliki hak dan kewajiban serta satu dengan yang lain bersuadara, sehingga kebutuhan mereka harus dipenuhi melalui pemanfaatan bersama secara fiar sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah.

Disatu pihak Islam mengakui kontribusi yang diberikan oleh kepentingan pribadi dan keinginan untuk memperoleh keuntungan terhadap inisiatif individu, dorongan, efisiensi dan kewirausahaan. Di pihak lain kejahatan dari ketamakan, nafsu yang tidak mengindahkan moral dan ketidakpedulian terhadap hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan orang lain yang selalu digembar-gemborkan oleh pandangan sekularis dan perspektif jangka pendek yang hanya melihat horizon duniawi belaka, baik itu kapitalisme maupun sosialisme dapat diatasi dengan cara memperkenalkan sebuah mekanisme internal yang mampu bekerja secara otomatis dengan penekanan yang tidak pernah berakhir pada keimanan kepada Allah, nilai-nilai moral, pertanggungjawaban dihadapan Allah, persaudaraan manusia dan keadilan sosioekonomi.

Gagasan mengenai pertanggung jawaban di depan Allah dapat berfungsi sebagai kekuatan yang member motivasi kuat bagi individu untuk mematuhi nilai-nilai moral dan mencegah mereka untuk mengikuti nafsu melebihi batas-batas norma sosial dan kesejahteraan. Persaingan dan kekuatan-kekuatan pasar yang menurut Adam Smith mampu

menjalankan fungsi ini memang dapat berperan serta komplementer, tetapi tidak cukup efektif untuk menjamin kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶⁵

Hal ini disebabkan oleh pertama persaingan bisa bersifat tidak sehat dan kedua kepentingan diri sendiri yang bersifat duniawi dan tidak terhambat oleh ajaran-ajaran moral mungkin akan cenderung menemukan cara-cara yang berbeda dalam mempertahankan persaingan dan menghambat operasi kekuatan-kekuatan pasar terutama ketika kekayaan dan kekuasaan terdistribusi secara tidak merata.

3. Restrukturisasi Sosioekonomi

Meskipun demikian boleh jadi nilai-nilai tersebut dilanggar dan gagasan mengenai pertanggungjawaban di depan Allah SWT dalam banyak kasus terlalu lemah pengaruhnya pada perilaku manusia, bahkan dalam suatu masyarakat yang bermuatan moral sekalipun, individu mungkin cenderung untuk tidak mengindahkan masalah-masalah kelangkaan dan prioritas-prioritas sosial dalam alokasi sumber-sumber daya, bila keadaan sosioekonomi tidak kondusif. Mereka mungkin tidak menyadari kebutuhan-kebutuhan orang lain yang lebih urgen dan yang belum dapat dipenuhi, dan walaupun mereka berbuat mungkin secara tidak disadari telah mengikuti trend (kencenderungan) sosial yang tidak sehat dan memalingkan sumber-sumber daya yang terbatas dari upaya untuk

⁶⁵ *Idem* hlm 174

memenuhi kebutuhan orang dalam rangka memuaskan keinginan-keinginan mereka secara relatif kurang penting.

Karena itu sangatlah perlu memperkuat nilai-nilai moral dengan melakukan restrukturisasi sosioekonomi dalam suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan social dan stabilitas ekonomi. Restruktutisasi itu harus bertujuan:

1. Mentransformasi factor manusia dalam pembangunan untuk menjadikannya mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata.
2. Mereduksi konsetasi kepemilikan sarana-sarana produksi yang kini sedang berjalan sebanyak mungkin untuk melengkapi peran transformasi moral dalam meminimalkan pengaruh kekuasaan dan kekayaan dalam alokasi dan distribusi sumber-sumber daya.
3. Mengeliminasi atau meminimalkan segala bentuk konsumsi berlebihan dan tidak perlu baik pada tingkat swasta maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan tabungan dan memperbesar volume sumber daya yang tersedia untuk investasi dan pemenuhan kebutuhan.
4. Melakukan reformasi sistem keuangan sedemikian rupa sehingga mampu berperan secara komplementer dalam restrukturisasi diatas.

3.1.4 Kebijakan Pembangunan Ekonomi menurut Chapra

A. Lima Tindakan Kebijakan

Pendekatan Islam yang berdimensi empat (melengkapi mekanisme pasar dengan filter moral, memotivasi individu ikut menanggung kepentingan sosial, restrukturisasi sosioekonomi, dan peranan positif pemerintah) harus dapat membuktikan lebih efektif dalam menjamin keajahteraan semua anggota masyarakat daripada pendekatan kapitalis atau sosialis yang berdimensi tunggal dan hanya mengandalkan pada kepeningan diri sendiri dan kekuatan-kekuatan pasar atau hanya mengandalkan kolektivisasi dari perencanaan pusat. Berbeda dengan ini, pada umumnya pemerintah di negara-negara Muslim yang lebih miskin, memiliki pandangan sekuler ke dalam (dan bukan keluar), seiring dengan kebijaksanaan konvensional yang dipinjam dari kultur sekuler Barat yang menempatkan sebuah posisi dominan pada saat ini. Karena itulah maka mereka tidak mampu memformulasikan suatu strategi pembangunan dengan keadilan.⁶⁶

Ketika memformulasikan kebijakan-kebijakan dalam kerangka ini, tidak mungkin dan tidak perlu harus menemukan suatu preseden bagi semua kasus yang bersangkutan dalam sejarah Islam dahulu. Kendatipun syariat Islam telah memberikan elemen-elemen pokok mengenai suatu

⁶⁶ Umer Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta, Gema Insani Press, 2000) hlm 195

strategi dasar, namun membolehkan fleksibilitas dalam ruang dan waktu dengan tidak menyebutkan tindakan-tindakan kebijakan yang terlalu detail. Ini semua harus di kembangkan. Boleh juga meniru pengalaman-pengalaman negara lain dalam menerapkan beberapa kebijakan yang spesifik.

Di bawah ini ada lima tindakan kebijakan yang diajukan bagi pembangunan yang disertai dengan keadilan dan stabilitas. Lima kebijakan tersebut adalah:

1. memberikan kenyamanan kepada faktor manusia.
2. mereduksi konsentrasi kekayaan.
3. melakukan restrukturisasi ekonomi.
4. melakukan restukturisasi keuangan.
5. rencana kebijakan strategis.

● Di antara tindakan-tindakan kebijakan ini mungkin sudah sangat akrab bagi mereka yang sudah bergelut dalam literatur pembangunan. Akan tetapi, apa yang lebih penting adalah injeksi dimensi moral ke dalam parameter pembangunan material. Tanpa sebuah integrasi moral dan material seperti itu, barangkali tidak mungkin dapat diwujudkan adanya efisiensi atau pemerataan seperti yang sudah didefinisikan di atas.

1. Memberikan Kenyamanan kepada Faktor Manusia

Manusia merupakan elemen hidup dan pokok dan setiap program pembangunan, Mereka adalah tujuan sekaligus sebagai sasaran

pembangunan mereka tidak dipersiapkan secara tepat untuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan. Karena itu, tugas yang paling menantang di depan negara muslim adalah memotivasi faktor manusia untuk melakukan apa saja yang diperlukan demi kepentingan pembangunan yang berkeadilan. Individu harus mau memberikan apa yang terbaik dengan bekerja keras dan efisien disertai dengan integritas, kejujuran, dan disiplin dan (kalau berkorban untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam perjalanan pembangunan. Mereka juga harus bersedia mengubah konsumsinya, menumbuhkan perilaku menabungnya, dan melakukan investasi sesuai dengan apa yang diperlukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan pemerataan yang lebih besar dan ketidakseimbangan yang lebih kecil.

Motivasi saja tidak akan memadai untuk mengeluarkan potensi terbaik kemanusiaan. Mereka juga harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi dan metode manajemen yang lebih baik. Hal ini menuntut adanya pelatihan yang memadai dan akses kepada keuangan. Apabila upaya-upaya seperti ini tidak dilakukan, motivasi saja tidak akan mendekatkan sistem ekonomi kepada realisasi potensi optimal dari faktor manusia.

Ada hubungan dua jalur antara kekuatan moral dan keadilan sosioekonomi. Suatu hal yang tidak mungkin apabila merealisasikan salah satunya tanpa kemajuan serentak dengan hal yang lain. Di negara-negara

muslim, di mana kekuatan moral masyarakat tengah dikebiri oleh ketidakadilan sosioekonomi, sangat tidak realistis untuk meningkatkan kesadaran moral hanya lewat ceramah dan khutbah; justru untuk menghilangkan ketidakmerataan dan menegakkan keadilan harus dilakukan lewat restrukturisasi sosioekonomi dan masyarakat. Karena itu, persoalan bagaimana merealisasikan keadilan perlu disampaikan sebelum imperatif transformasi moral dibahas lebih lanjut.

1). Keadilan Sosioekonomi

Imbalan materi telah menjadi sedemikian tidak wajar sehingga mayoritas orang tidak menerima upah yang memadai bagi pekerjaan kasar mereka, kreativitas dan kontribusi yang diberikan kepada output. Karena itu, mereka kemudian menjadi apatis, sementara inisiatif, dorongan (semangat), dan efisiensi mereka menurun secara mencolok. Ada dua faktor yang bertanggung jawab dalam masalah ini. Pertama, kurang realistiknya kebijakan-kebijakan resmi dan yang kedua konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Kurang realistiknya kebijakan-kebijakan tersebut telah menyebabkan distorsi pada harga-harga pokok yang secara tidak disadari menurunkan pendapatan para petani penggarap, perusahaan-perusahaan berskala mikro, dan para pekerja, juga mereduksi permintaan mereka akan kebutuhan-kebutuhan dan menciptakan misalokasi sumber-sumber daya terhadap pemenuhan kebutuhan. Konsentrasi kekayaan dan

kekuasaan juga terjadi dan disebabkan sebagian oleh kebijakan-kebijakan resmi dari sebagian lain karena sistem ekonomi yang bersifat eksploitatif yang telah berlangsung berabad-abad, telah menghalangi persaingan dan menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi malapetaka di kalangan penduduk miskin di kota dan di desa. Ini semua telah mereduksi kesediaan mereka dan juga kemampuannya untuk melakukan yang terbaik.

Karena itu, lebih baik memperkenalkan suatu paket kebijakan yang sepenuhnya berbeda, yaitu kebijakan-kebijakan yang dapat memotong ujung eksploitasi pertama, dengan meningkatkan produktivitas pekerja dan yang kedua dengan memperluas kesempatan bagi wirausaha bagi penduduk di pedesaan maupun di perkotaan. Kebijakan-kebijakan demikian harus mengandung:

1. penyediaan pusat-pusat latihan vokasional yang memadai untuk meningkatkan produktivitas, memperluas kemudahan pembiayaan untuk mendorong industri kecil dan mikro, dan
2. merestrukturisasi ekonomi secara keseluruhan agar memihak kepada pemenuhan kebutuhan dan distribusi kekayaan serta pendapatan yang lebih merata.
3. Kebijakan-kebijakan ini harus ditopang dengan skema bagi hasil yang memungkinkan untuk menjadikan pekerja mampu memberikan andil dalam keuntungan perusahaan-perusahaan.

Setiap perusahaan harus dihimbau untuk menerapkan skema bagi hasil kepada karyawannya. Jumlah tertentu yang disepakati dan keuntungan bersih perusahaan harus diminta sebagian untuk dialokasikan bagi para pekerja sebagai bonus bagi hasil dan sebagian lainnya disediakan untuk fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kondisi kerja mereka dan sebagian jaminan kesehatan, tunjangan pendidikan untuk anak-anak fasilitas perumahan, dan subsidi makanan.

Dengan meningkatnya pendapatan dan tunjangan bagi para karyawan melebihi standar minimum yang diperlukan untuk kehidupan nyaman, yang diambil dari keuntungan perusahaan akan memberikan sejumlah manfaat antara lain adalah:

1. mengurangi sikap apatis yang sedang berlangsung dengan memperbaiki moral pekerja,
2. memperbaiki hubungan karyawan-manajemen melalui partisipasi karyawan dan pengelolaan karyawan sehingga akan membantu memperkokoh karakteristik utama suatu masyarakat muslim,
3. mempertahankan pendapatan karyawan agar tetap fleksibel dan responsif terhadap kesehatan ekonomi nasional dan kinerja perusahaan -proporsi bagi hasil untuk karyawan akan meningkat pada saat keuntungan perusahaan cukup bagus akan tetapi mereka tidak akan terkena PHK bilamana keuntungannya mengecil atau mengalami kerugian;

4. Mereduksi penghindaran pajak (dengan catatan bahwa sistem perpajakan direformasi), sebab para pekerja karena kepentingannya sendiri, akan selalu memonitor keuntungan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya dihubungkan dengan silap keacuhan mereka, dan
5. Meningkatkan daya saing ekonomi dan perusahaan sehingga mem perbaiki iklim keseluruhan investasi dan kinerja ekonomi makro. Pada saat menerapkan skema bagi hasil itu, perlu adanya jaminan bahwa kebijakan ini tidak mengarah kepada eksploitasi. Hal ini dapat saja terjadi jika upah minimum, yang tidak berisiko, tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar para pekerja.

2. Mereduksi Konsentrasi Kekayaan

- a. Reformasi pertanahan dan pembangunan pedesaan
 - 1) Luas kepemilikan tanah
 - 2) Syarat-syarat penyewaan
 - 3) Dasar berfikir dan tujuan
 - 4) Pembangunan pedesaan
- b. Pengembangan industri mikro dan kecil
- c. Kepemilikan yang lebih luas dan kontrol perusahaan
- d. Pengaktifan zakat dan sistem warisan Islam
 - 1) Zakat program bantu-diri sosial
 - 2) Warisan
- e. Restrukturisasi sistem keuangan

3. Restrukturisasi Ekonomi

Realokasi sumber-sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan yang merata tidak akan berjalan, seperti telah dikemukakan di depan, tanpa adanya suatu penataan kembali perekonomian yang meliputi semua aspek ekonomi, termasuk konsumsi swasta, keuangan pemerintah, formasi kapital dan produksi. Beberapa aspek yang relevan akan dibahas di bawah ini.

A. Mengubah preferensi konsumen

- 1) Memperkenalkan filter moral
- 2) Kebutuhan dan kemewahan
- 3) Liberalisasi pemenuhan kebutuhan

B. Reformasi keuangan pemerintah

- 1) Prioritas dalam belanja pemerintah
- 2) Prinsip-prinsip pembelanjaan
- 3) Mana yang harus dipotong
 - a) Korupsi, inefisiensi, dan tabdzir
 - b) Subsidi
 - c) Perusahaan milik negara
 - d) Pertahanan
- 4) Reformasi pajak
- 5) Defisit yang dipertahankan
- 6) Membiayai defisit secara Islami

C. Restrukturisasi iklim investasi

- 1) Menghapuskan hambatan

- a) Ketidakpastian politik
 - b) Kontrol terhadap nilai tukar dan depresiasi mata uang
 - c) Tarif dan subsidi impor
 - d) Kontrol birokrasi
- 2) Penyertaan modal luar negeri
- D. Produksi yang didasarkan pada kebutuhan
- E. Pendekatan baru bagi pengangguran
- 1) Mendorong IKM (Industri Kecil dan Mikro)
 - 2) Tindakan-tindakan esensial

4. Restrukturisasi Finansial

Tujuan untuk mencapai pengembangan UKM di pedesaan dan perkotaan dalam rangka memecahkan problem utama ekonomi, seperti pengangguran dan konsentrasi kekayaan akan tetap menjadi mimpi yang indah kecuali ada persiapan-persiapan pengembangan dan pembiayaannya

Orang menjadi miskin bukan karena tidak ada kesediaan mereka untuk bekerja keras atau kekurangan keterampilan. Mereka sebenarnya sudah bekerja lebih keras daripada orang kaya dan mempunyai keterampilan lebih baik dan mereka.

Problem utama mereka adalah bahwa mereka tidak mempunyai akses kepada sumber-sumber daya finansial yang cukup untuk berwirausaha dan upah pekerjaan baik karena tidak secara optimal menggunakan keterampilan mereka atau karena upah yang diterima tidak mencukupi kebutuhannya apalagi menabung untuk investasi. Pembiayaan

usaha adalah senjata ekonomi sosial dan politik yang kuat dan berperan sangat penting dan menentukan basis kekuasaan, status sosial, dan kondisi ekonomi bagi setiap orang dalam dunia modern. Karena itulah, Dr. Muhammad Yunus secara tepat menekankan bahwa pembiayaan bagi wirausaha seharusnya “diakui sebagai suatu hak yang menaikkan peran kritis dalam mencapai HAM”.⁶⁷ Karena itu, reformasi sistem sosial merupakan salah satu elemen kunci dan semua reformasi sosioekonomi dan politik.

The Select Committee on Hunger menemukan bahwa “penyediaan kredit kecil bagi usaha mikro dalam sektor informal di negara-negara berkembang dapat secara signifikan meningkatkan standar hidup orang-orang lemah dan menambah jaminan makanan serta menyebabkan perbaikan lokal”. Komite tersebut menyimpulkan bahwa “mengucurkan kredit bagi usaha-usaha mikro merupakan salah satu cara untuk mengakhiri lingkaran setan kemiskinan dan kelaparan bagi penduduk perkotaan, pedesaan yang tidak bertanah di negara-negara berkembang”.

Penggunaan sistem finansial yang diilhami oleh ajaran Islam dapat lebih kondusif dalam mengontrol kemampuan dan membawanya untuk dapat menjadikan UKM mampu menghasilkan output, menciptakan lapangan kerja dan distribusi pendapatan. Tanggungan risiko bersama disertai dengan imbalan oleh lembaga keuangan secara substansial akan

⁶⁷ Schumacher, *Small is Beautiful* (London : Blond and Briggs, 1973), hlm 18

mengurangi ketidakpastian posisi pengusaha kecil-dia akan menyelamatkan dirinya dari beban berat membayar bunga pada masa-masa sulit dengan kesiapannya untuk membayar laju keuntungan yang lebih tinggi pada waktu lapang. Lembaga finansial cukup memenuhi syarat untuk menanggung risiko bersama dan dapat berbuat demikian tanpa mengurangi kekuatan finansialnya jika Ia membangun cadangan pengganti kerugian pada waktu lapang.

Betapa pun sistem finansial itu dirombak untuk dapat konsisten dengan ajaran-ajaran Islam, masih sangat perlu menghapuskan dua penyebab utama yang bertanggung jawab pada kegagalan atau ketidakmampuan bank-bank komersial membiayai petani kecil dan UKM. Pertama adalah kelemahan ekonomi di mana sektor ini beroperasi dan yang kedua adalah risiko yang begitu besar dan biaya yang akan ditanggung oleh bank.

Untuk menggantikan keuntungan yang telah diterima pada masa lalu, pemerintah kini harus memihak kepada UKM dan petani kecil. Baik tujuan-tujuan syariat maupun prinsip-prinsip pembelanjaan pemerintah yang telah dibahas sebelumnya memberikan justikasi adanya alokasi tertentu dari sumber-sumber daya pemerintah untuk tujuan ini. Namun demikian, sebagian dari ongkos yang ditambahkan harus ditutup dari bank dan UKM, paling tidak untuk mendorong tanggung jawab dan efisiensi.

Barangkali diharapkan pada saat jaminan UKM telah dibentuk dari system telah dimulai maka ongkos akan cenderung turun.

Islamisasi bank dan pembiayaan UKM mungkin akan membantu menggalakkan tabungan dan pendudukpedesaan yang belum diserap oleh sistem perbankan karena kurangnya kepercayaan mereka terhadap bank yang didasarkan pada bunga dan sikap apatis bank terhadap mereka. Hal ini akan memobilisasi tabungan yang menganggur dalam mendorong ekonomi lebih tinggi, tetapi tidak mengakibatkan inflasi. Hal itu juga akan membantu mengurangi daya tarik emas sebagai penyimpan nilai dan menggalakkan tabungan untuk investasi.

5. Perencanaan Kebijakan Strategi

Tidaklah mungkin bagi negara-negara muslim untuk mewujudkan tujuan-tujuan syariat Islam (*maqashid*) dalam keterbatasan sumber-sumber daya (langka) kecuali jika mereka mengambil hajat-hajat dari sumber daya serta memilikinya dengan menggunakan sumber daya tersebut secara benar. Barangkali hal ini dapat dilakukan secara lebih efektif jika suatu perencanaan strategi jangka panjang dipersiapkan.

Perencanaan tidaklah perlu komprehensif, namun mencoba untuk mencapai suatu keseimbangan bagi semua input dan output, serta alokasinya di antara unit-unit mikro dalam perekonomian, melalui suatu jaringan kontrol peraturan. Perencanaan tersebut juga jangan mengandalkan pemerintah sebagai sumber utama investasi dan usaha

bisnis. Hal ini tidak baik dan tidak perlu. Setiap gerakan yang mengakibatkan perekonomian kurang responsif terhadap situasi yang sedang berubah menekan inisiatif individu serta usaha, akan melahirkan kontradiksi masalah-masalah yang tak pernah selesai di mana telah merugikan negara-negara sosialis dan berkembang yang berlandung pada perencanaan demikian.

Yang perlu dilakukan oleh negara-negara muslim adalah meloloskan semua klaim terhadap sumber-sumber daya melalui mekanisme filter nilai-nilai Islam dan memotivasi serta mengaktifkan sektor swasta melalui reformasi moral dan institusi serta insentif-insentif ekonomi. Di samping itu, juga menggunakan sumber daya yang langka dengan efisiensi yang optimal dan pemerataan dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan syariat.

- Penekanan mekanisme filter Islam jelas tidak bisa ditawar. Hal itu akan membantu menentukan tujuan-tujuan ekonomi menurut skala prioritas dan menentukan cara-cara untuk mencapainya. Pembentukan skala prioritas dalam rangka kerja syariat akan membantu analisis alokasi sumber daya yang kini tengah berjalan dan menentukan arah perubahan. Juga perlu ditekankan nilai-nilai Islam tentang konsumsi, tabungan, dan investasi, etika kerja dan mencerdaskan program-program pendidikan untuk mendorong tercapainya hal itu. Perencanaan ini juga harus

mengklasifikasi barang-barang dan jasa ke dalam kebutuhan dan kemewahan seperti yang telah dibahas sebelumnya.

3.2 Kondisi Perekonomian Indonesia Dua Dekade Terakhir

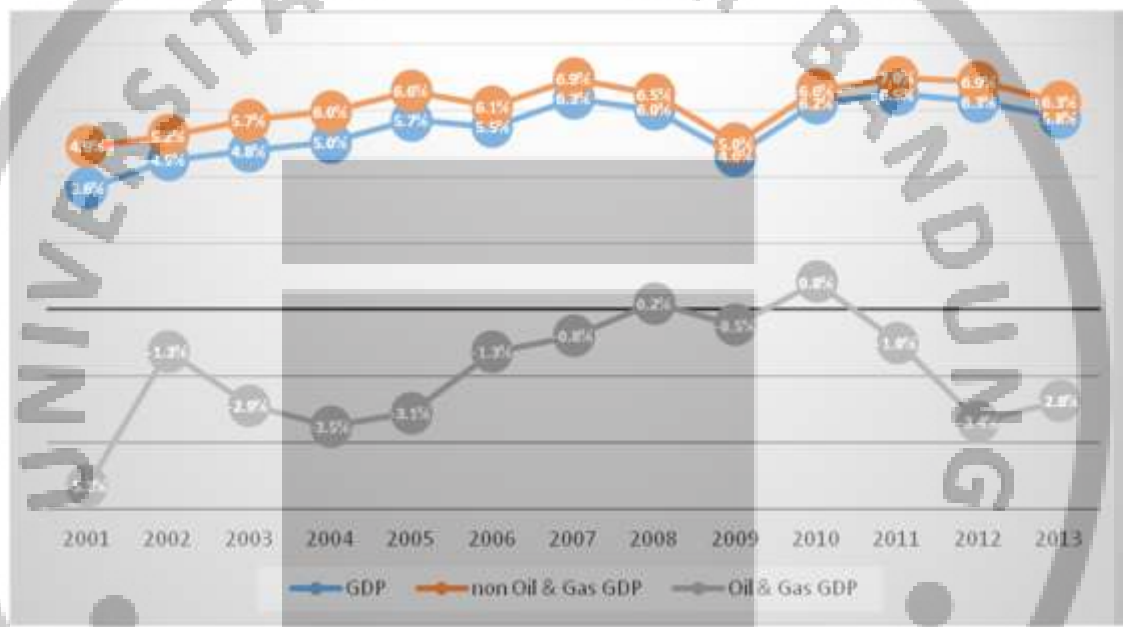
Selama satu dekade terakhir, perekonomian global dilanda krisis dan ketidakpastian. Kondisi global ini pun menyeruak masuk melalui berbagai saluran keterkaitan untuk mempengaruhi perekonomian nasional. Menjadikan perkembangan dinamika perekonomian domestik pun tidak mudah untuk diprediksikan secara akurat. Ketidakpastian global mempengaruhi pola pertumbuhan perekonomian Indonesia dalam dekade ini.

Secara perlahan namun pasti pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2001-2005 mengalami peningkatan, perekonomian tumbuh secara berurutan sebesar 3,6%, 4,5%, 4,8%, 5,0% dan 5,7%. Mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia sudah mulai mengalami *recovery* dari krisis Asia 1998. Pertumbuhan ekonomi dalam periode ini ditopang oleh tumbuhnya konsumsi domestik dan membaiknya kinerja perdagangan internasional sebagai akibat meningkatnya volume perdagangan dunia. Investasi terutama di sektor komunikasi dan beberapa sektor lain yang mengandalkan teknologi pun tumbuh. Sektor usaha kecil dan menengah (UKM) pun mengalami pertumbuhan signifikan.

Namun karena berbagai kerusakan fasilitas infrastruktur sebagai akibat terjadinya beberapa bencana alam (antara lain: Tsunami di Aceh

dan gempa bumi di Sumatera Barat dan Yogyakarta) mengakibatkan pelambatan investasi sehingga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2006 sedikit mengalami koreksi. Perekonomian hanya mampu tumbuh sebesar 5,5%; lebih rendah dari tahun 2005 yang mencapai 5,7%.⁶⁸

Gambar 2: Pertumbuhan Ekonomi 2001-2013



Pada tahun 2007, perekonomian Indonesia kembali mengalami peningkatan pertumbuhan yang pesat. Ditopang oleh kembali bergairahnya sektor perdagangan dan sektor manufaktur serta didorong oleh konsumsi publik dan meningkatnya kinerja ekspor, perekonomian berhasil tumbuh sebesar 6.3%. Akan tetapi momentum ini tidak bertahan lama, tahun 2008 perekonomian hanya mampu tumbuh 6% karena

⁶⁸ Alfirman, L. (2014), "Perkembangan dan Tantangan Perekonomian Indonesia", Presentasi pada Seminar Kebijakan Fiskal di Medan 19 Maret 2014

dampak pelambatan perekonomian global akibat pelemahan perdagangan dunia sejalan krisis yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Setahun berikutnya, kondisi krisis global ini semakin memburuk dengan spektrum yang semakin meluas dan membawa imbas bagi ekonomi Indonesia sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,6%. Walau pun angka ini termasuk tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya.

Tahun 2010 dan 2011, perekonomian Indonesia mampu tumbuh cukup tinggi 6,2% dan 6,5%. Walaupun krisis global belum pulih, namun sektor perdagangan, industri manufaktur, pertambangan dan pertanian kembali menggeliat untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi ini. Tahun 2012, walaupun perekonomian dunia masih suram ditandai dengan penurunan tingkat pertumbuhan volume perdagangan dunia, pertumbuhan perekonomian Indonesia masih cukup kencang di level 6,2%⁶⁹

Badan Pusat Statistik pada Februari 2014 mempublikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi 2013 sebesar 5,8%. Pelemahan pertumbuhan ekonomi di *developed countries* dan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global sebagai respon rencana pengurangan stimulus ekonomi di Amerika Serikat membawa dampak koreksi atas pertumbuhan ekonomi

⁶⁹ Putri, R.E. (2014), "*Indonesia's economy grows despite global turmoil*", The Jakarta Post: Selasa, 4 Maret 2014

di *emerging market*, termasuk Indonesia. Pelambatan pertumbuhan perekonomian dunia dan meningkatnya risiko perekonomian global, telah memaksa pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan serangkaian paket kebijakan penyelamatan ekonomi untuk menavigasi biduk perekonomian bangsa agar tidak karam dihempas gelombang; agar tetap mampu berjalan selamat menjaga momentum pertumbuhan yang sudah mulai nyata.

